

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KAPASITAS FISKAL PROVINSI SULAWESI UTARA**

**Jacelin Joice Limpele<sup>1</sup>, Debby Ch. Rotinsulu<sup>2</sup>, Ita Pingkan F. Rorong<sup>3</sup>**

*Email: [jacelinjoice30@gmail.com](mailto:jacelinjoice30@gmail.com)*

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi  
Universitas Sam Ratulangi*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengeluaran pemerintah dalam hal ini Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Permasalahan yang terjadi di masing-masing daerah pada umumnya mencakup pembangunan daerah itu sendiri yang memiliki kendala-kendala didalam prosesnya.

Pertumbuhan Ekonomi adalah permasalahan jangka panjang yang dihadapi oleh suatu negara dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional riil. Pertumbuhan Ekonomi mengukur seberapa besar keberhasilan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mengalami pertambahan jumlah dan kualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sukirno (2000).

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh berdasarkan data yang tersedia dan bersumber dari laporan Badan Pusat Statistik. Data yang tercakup dalam penelitian ini adalah data Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tahun 2001-2020, objeknya adalah Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Path (jalur).

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Langsung berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi sementara Belanja Tidak Langsung tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara dan Belanja Langsung berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sulawesi Utara dan Belanja Tidak Langsung tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sulawesi Utara, tetapi secara bersama Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sulawesi Utara.

**Kata Kunci** : Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

**ABSTRACT**

*Research aims to understand the effects of government spending in this expenditure direct and indirect expenditures on economic growth and revenue regional government in north sulawesi. The problem in each region generally includes regional development itself having. constraints in the process Economic development is a process.*

*Economic growth is long term problems faced by a country in efforts to improve national income rill. Economic growth measuring how much success a country in producing goods and services influenced by factors that experienced increase the number and the quality so can increase public welfare.Sukirno (2000 ).*

*As for the data used in this research was secondary data obtained based on the data available and comes in a report to the central of statistics . The data included in this study is the data, economic growth , revenue shopping direct and indirect spending years 2001-2020, its object was. north sulawesi province Analysis method used is an analysis path .*

*Findings the results of the research shows that direct expenditure influential on economic growth while expenditure indirect has not been affecting the economic growth in north sulawesi , And direct spending influential on local revenue in north sulawesi and indirect spending no effect on local revenue in north sulawesi, But together direct expenditure , indirect spending and economic growth influence on local revenue in north sulawesi .*

**Keyword :** Local revenue , economic growth , both direct and indirect spending

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang diukur dengan capaian GDP perkapita, kemajuan tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan rata-rata, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, presentasi nilai investasi terhadap GDP dan semua faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Kumenaung dkk, 2018).

Kenaikan GDP dari tahun ketahun akan menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi autonomous Invesment, Induced Invesment, dan potensi sektor ekonomi negara atau daerah tersebut. Selain itu ketersediaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kualitas sumber daya manusia, teknologi dan semangat wirausaha dari suatu masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi adalah permasalahan jangka panjang yang dihadapi oleh suatu negara dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional riil. Pertumbuhan Ekonomi mengukur seberapa besar keberhasilan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh faktor -faktor yang mengalami penambahan jumlah dan kualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sukirno (2000) dalam analisis makro menyatakan bahwa tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai oleh suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Di setiap periode suatu masyarakat akan menambah kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Investasi masa lalu yang akan menambah barang-barang modal dan kapasitas memproduksi masa kini. Disamping itu investasi diikuti oleh perkembangan teknologi alat-alat produksi dan mempercepat kemampuan memproduksi. Berbagai negara tidak selalu dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan kemampuan memproduksi yang dimiliki oleh faktor-faktor produksi yang semakin meningkat (Sukirno, 2005).

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah produk domestik bruto. Menurut Badan Pusat Statistik, PDB (Product

Domestic Bruto) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai pasar barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun-tahun sebelumnya (Haryanto, 2013).

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan. Sulawesi Utara merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki banyak potensi daerah baik dari segi sumber daya manusia maupun sumberdaya alam, tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang paling penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia.

**Tabel 1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2001-2020**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2001	2,12
2002	3,26
2003	3,20
2004	4,26
2005	5,35
2006	5,72
2007	6,47
2008	10,86
2009	7,85
2010	7,16
2011	6,17
2012	6,86
2013	6,38
2014	6,31
2015	6,12
2016	6,17
2017	6,32
2018	6,01
2019	6,58
2020	4,27

Sumber : Sulut dalam angka 2002-2020

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara mengalami Fluktuasi dari tahun 2001 dan meningkat secara pesat sampai pada tahun 2008 dengan persentase sebesar 10,86 dan mengalami penurunan di tahun 2009 sampai pada tahun 2011 diakibatkan adanya krisis ekonomi yang mengguncang perekonomian global termasuk Sulawesi Utara dan di 2018 penurunan angka

pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan pertumbuhan dikarenakan melambatnya sektor pertanian, jasa keuangan dan asuransi, dan industri pengolahan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada kuartal III terkoreksi menjadi 5,66% atau menurun 0,17% dibandingkan kuartal II 2018 sebesar 5,83%. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Sulut pada kuartal III ini mengalami penurunan lebih dalam bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di mana pertumbuhan ekonomi Sulut menyentuh level 6,49%. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi Sulut masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,17%. Beberapa sektor yang berkontribusi cukup besar kepada PDRB [Produk Domestik Regional Bruto] tapi tumbuh melambat juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi tersendat. Dan di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara kembali mengalami peningkatan. Peningkatan pertumbuhan daerah yang ada di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingkat pendapatan daerah itu sendiri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Pemberlakuan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan dan aset daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2001). Tujuan PAD yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 3 yaitu memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Jadi, semakin tinggi penerimaan PAD yang diperoleh oleh daerah maka akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi karena PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang penting bagi daerah.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali

sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi daerah yang cukup besar jika dilihat dari kondisi wilayah yang ada yaitu dengan wilayah yang strategis di lihat dari segi pertanian, perikanan dan kelautan, sektor-sektor lainnya, yang memberikan dampak terhadap perkembangan daerah diantaranya pendapatan. Kondisi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara di sebelum masa pandemic Covid-19 mengalami peningkatan sampai pada tahun 2019. Berbagai upaya di lakukan dalam masa pemerintahan ODSK guna meningkatkan pendapatan asli daerah yang ada di Sulawesi Utara. Peningkatan pendapatan didorong oleh peningkatan pendapatan pajak daerah. Selain itu, peningkatan pendapatan didorong oleh kenaikan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Pendapatan terbesar diperoleh melalui pajak daerah, di samping kenaikan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan penjelasan tabel dapat dilihat bahwa mengalami perkembangan setiap tahunnya, hal ini menggambarkan bahwa tingkat kemandirian daerah yang ada semakin meningkat, sehingga dapat di jadikan sebagai salah satu alat tolak ukur dari keberhasilan pemerintah dalam hal meningkatkan pendapatan daerah melalui beberapa upaya. Meningkatnya pendapatan asli daerah yang juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi ditunjang oleh beberapa hal yakni didalamnya pengeluaran pemerintah termasuk di dalamnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Berikut tabel belanja langsung dan belanja tidak langsung :

**Tabel 2**  
**Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Provinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2001-2020**

Tahun	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
2001	147,7270347	125,363156
2002	145,0186970	128,134570
2003	223,7102730	158,559348
2004	223,7102730	158,559348
2005	223,7102730	158,559348
2006	326,6607716	238,494527
2007	236,2553670	268,063689
2008	552,4148850	104,028765
2009	571,4240519	160,364229
2010	406,5478540	166,128627
2011	863,8953571	234,429578
2012	940,8702680	357,608718
2013	692,4007991	656,186956
2014	1049,4786210	888,202456
2015	1439,9886664	986,333658
2016	1439,9886664	942,097352
2017	1591,3252510	1989,246543
2018	1529,2347300	2126,867230
2019	1986,3798170	2193,052020
2020	2327,5543860	2242,900865

*Sumber : Sulawesi Utara dalam angka 2002-2021*

Berdasarkan tabel belanja langsung dan belanja tidak langsung di Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan di sepanjang 20 tahun, meningkatnya belanja langsung dan belanja tidak langsung diharapkan mampu menunjang perekonomian yang ada. Belanja daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah, di samping pos pendapatan pemerintahan daerah. Semakin besar belanja daerah maka akan semakin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara ?
2. Bagaimanakah pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara ?
3. Bagaimanakah pengaruh secara bersama belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara ?

4. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara
5. Bagaimanakah pengaruh secara bersama belanja langsung, belanja tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara ?

### **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara
2. Menganalisis pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara
3. Menganalisis secara bersama pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara
4. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara
5. Menganalisis secara bersama pengaruh belanja langsung, belanja tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara

### **Manfaat Penelitian**

1. Memberikan bukti empiris pengeluaran pemerintah dalam hal ini belanja langsung dan belanja tidak langsung, pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi, khususnya kajian dan penelitian tentang pengeluaran pemerintah yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara

## **LANDASAN TEORI**

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu. (Presetyo 2009).

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Halim (2007 : 96) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

### **Pengeluaran Pemerintah**

Menurut Sukirno (2000), “Pengeluaran Pemerintah (Government Expediture) adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian dengan menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam APBN dan APBD setiap tahunnya”.

### **Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung**

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan secara langsung, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja langsung terdiri dari :

#### **1. Belanja Pegawai**

Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung tersebut dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja jenis ini antara lain untuk menampung honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa

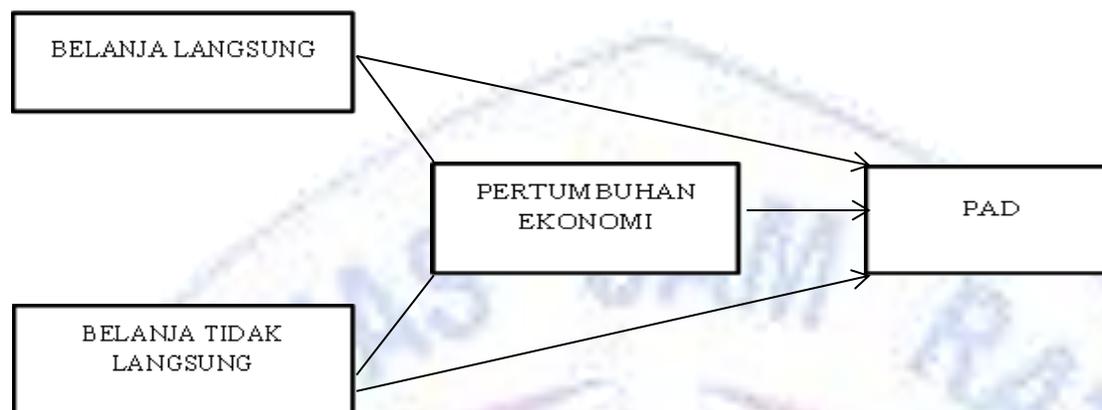
#### **2. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan untuk dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

#### **3. Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aktiva tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. Buletin Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Nomor 04 yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang terbit pada tanggal 29 Desember 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga.

### Kerangka Pemikiran



### METODE PENELITIAN

#### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang tercakup dalam penelitian ini adalah data Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Langsung dan Belanja tidak langsung tahun 2001-2020 Provinsi Sulawesi Utara, disertai dengan data-data sekunder lain yang relevan dengan tujuan penulisan tesis ini.

#### Hipotesis

1. Diduga belanja langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara
2. Diduga belanja tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara
3. Diduga secara bersama belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara
4. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara
5. Diduga secara bersama belanja langsung, belanja tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara

#### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Data yang digunakan dalam model penelitian ini akan disajikan pada lampiran. Variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Langsung (X1) : adalah realisasi belanja langsung, dalam satuan rupiah pertahun
2. Belanja Tidak Langsung (X2): adalah realisasi belanja tidak langsung, dalam satuan rupiah pertahun
3. PAD (Y1) : adalah realisasi pendapatan asli daerah dalam satuan rupiah pertahun

4.Pertumbuhan Ekonomi (Y1): peningkatan PDRB di Provinsi Sulawesi Utara yang diukur berdasarkan harga konstan :

$$PE = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}}$$

**Metode Analisis**

Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah, maka metode analisis yang digunakan dalam hal ini adalah analisis path (jalur).

**Analisis Jalur**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung (Sunyoto,2012:1). Analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan (*magnitude*) dan signifikansi (*significance*) hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel (Sunyoto,2012:1). Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya analisis jalur merupakan kepanjangan dari regresi berganda.

**Persamaan Substruktur 1**

Dalam analisis ini persamaan model substruktur 1 dapat ditulis dengan persamaan matematis berikut :

$$Y1 = \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + e1 \dots\dots\dots 1$$

**Persamaan Substruktur 2**

Dalam analisis ini persamaan model substruktur 2 dapat ditulis dengan persamaan matematis berikut :

$$Y2 = \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + \beta_3 Y1 + e2 \dots\dots\dots 2$$

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Pengaruh belanja langsung (X1) dan belanja tidak langsung (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y1) di Sulawesi Utara**

**Tabel 3**  
**Hasil Perhitungan Regresi Berganda**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.048405	0.190303	-0.254358	0.8023
X1	0.561000	0.135006	4.155375	0.0007
X2	0.287691	0.111131	-2.588759	0.0191
F-statistic		10.79126		

$$\text{Persamaan : } Y1 = 0.048405 + 0.561000X1 + 0.287691X2$$

Berdasarkan tabel 3 hasil olahan evIEWS menjelaskan hasil nilai konstanta dari persamaan regresi sebesar 0.048405, koefisien regresi variabel belanja langsung (X1) sebesar 0.561000, koefisien regresi variabel belanja tidak langsung (X2) sebesar 0.287691

**Hasil uji parsial t belanja langsung (X1) terhadap parameter pertumbuhan ekonomi (Y1)**

$N = 20$  = Jumlah observasi,  $K = 4$  jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka degree of freedom (df) adalah  $N - k = 20 - 4 = 16$  lalu lihat tabel t distribution (df,F)  $\sim (16 ; 0,25) = 2.120$  dan t hitung = 4.155 Karena t hitung > t tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  di terima. Berarti secara Parsial variabel independen belanja langsung (X1) mampu memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara (Y1). Persamaan regresi menunjukkan angka positif untuk koefisien X1 dan hal ini sesuai dengan harapan teoritik bahwa belanja langsung memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Hasil uji parsial t belanja tidak langsung (X2) terhadap parameter Pertumbuhan ekonomi (Y1)**

$N = 20$  = Jumlah observasi,  $K = 4$  jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka degree of freedom (df) adalah  $N - k = 20 - 4 = 16$  lalu lihat tabel t distribution (df,F)  $\sim (16 ; 0,25) = 2.120$  dan t hitung = -2.588. Karena t hitung < t tabel, maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima. Berarti secara Parsial variabel independen belanja tidak langsung (X2) tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara (Y1). Persamaan regresi menunjukkan angka negatif untuk koefisien X2 dan hal ini tidak sesuai dengan harapan teoritik bahwa belanja tidak langsung tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Hasil Uji Slimutan F statistic**

Hipotesis : jika F hitung lebih besar dari F kritis, maka H0 menolak, artinya secara bersama-sama variabel X1,X2 artinya secara bersama-sama variabel X1,X2, berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara (Y1 jika F hitung lebih kecil dari F kritis maka gagal menolak H0 artinya secara bersama-sama variabel X1, X2 berpengaruh secara bersama terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara (Y1).  $\Omega = 5\%$ , N= jumlah observasi, K= 4 Jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka degree of freedom (df) adalah  $N-k= 20-4=16$  lalu lihat F tabel distribusi values =  $(\Omega = 0,5 : k-1, n-k) = F \text{ tabel} = 3.01$  F hitung = 10.79 Karena F hitung > F tabel, maka Ho di tolak dan Ha diterima. Berarti secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara (Y1). (Agus Widarjono, 2013).

**Pengaruh belanja langsung (X1), belanja tidak langsung (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (Y1) terhadap PAD di Sulawesi Utara (Y2)**

**Tabel 4**  
**Hasil Perhitungan Regresi Berganda**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.195967	0.162206	-1.208137	0.2445
X1	0.182109	0.206334	0.882595	0.3905
X2	0.805236	0.163066	4.938110	0.0001
X3	0.167680	0.111634	1.502056	0.1526
F-statistic		110.6409		

Persamaan :  $Y2 = 0.195967 + 0.182109X1 + 0.805236X2 + 0.167680X3$

Berdasarkan tabel 4 hasil olahan eviews menjelaskan hasil nilai konstanta dari persamaan regresi sebesar 0.195967, koefisien regresi variabel Pertumbuhan ekonomi (X1) sebesar 0.182109, koefisien regresi variabel belanja langsung (X2) sebesar 0.805236, koefisien regresi variabel belanja tidak langsung (X3) 0.167680

**Hasil uji parsial t pertumbuhan ekonomi (X1) terhadap parameter PAD**

N = 20 = Jumlah observasi, K = 4 jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka degree of freedom (df) adalah  $N - k = 20 - 4 = 16$  lalu lihat tabel t distribution (df,F)  $\sim (16 ; 0,25) = 2.120$  dan t hitung = 0.882 Karena t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha di tolak. Berarti secara Parsial variabel independen pertumbuhan ekonomi (X1) tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap PAD di Sulawesi Utara (Y).

**Hasil uji parsial t terhadap belanja langsung (X2) parameter PAD**

$N = 20$  = Jumlah observasi,  $K = 4$  jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka degree of freedom (df) adalah  $N - k = 20 - 4 = 16$  lalu lihat tabel t distribution (df,F)  $\sim (16 ; 0,25) = 2.120$  dan t hitung = 4.398 Karena t hitung > t tabel, maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima. Berarti secara Parsial variabel independen belanja langsung ( $X_2$ ) memberikan pengaruh secara signifikan terhadap penurunan angka PAD di Sulawesi Utara.

### Hasil uji parsial t belanja tidak langsung terhadap parameter PAD ( $Y_2$ )

$N = 20$  = Jumlah observasi,  $K = 4$  jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka degree of freedom (df) adalah  $N - k = 20 - 4 = 16$  lalu a tdalihat tabel t distribution (df,F)  $\sim (16 ; 0,25) = 2.120$  dan t hitung = 1.502. Karena t hitung < t tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  di tolak. Berarti secara Parsial variabel independen belanja tidak langsung ( $Y_1$ ) tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap PAD di Sulawesi Utara ( $Y_2$ ).

### Hasil Uji Slimutan F statistic

Hipotesis : jika F hitung lebih besar dari F kritis, maka  $H_0$  menolak, artinya secara bersama-sama variabel  $X_1, X_2$ , dan  $X_3$  berpengaruh terhadap PAD di Sulawesi Utara ( $Y_2$ ).  $H_a$ :  $\beta_1 \neq \beta_2$  artinya secara bersama-sama variabel  $X_1, X_2$ , dan  $X_3$  tidak berpengaruh terhadap PAD di Sulawesi Utara ( $Y_2$ ).  $\Omega = 5\%$ ,  $N$ = jumlah observasi,  $K= 4$  Jumlah variabel termasuk intersep/konstanta, maka degree of freedom (df) adalah  $N-k= 20-4=16$  lalu lihat F tabel distiribusi values =  $(\Omega = 0,5 : k-1, n-k) = F$  tabel = 3.01F hitung = 110.6 Karena F hitung > F tabel, maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima. Berarti secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi PAD di Sulawesi Utara ( $Y_2$ ). (Agus Widarjono, 2013).

### Pembahasan

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilakukan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dimasa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan dan hasil pertumbuhan ekonomi akan dapat pula dinikmati masyarakat sampai lapisan paling bawah, baik dengan sendirinya maupun dengan campur tangan pemerintah (Sirojuzilam, 2015).

Peningkatan pertumbuhan daerah khususnya Provinsi Sulawesi Utara perlu ada aspek pendorongnya, yakni belanja daerah. Berdasarkan hasil dari penelitian ini belanja daerah yang tercantum didalamnya belanja langsung dan belanja tidak langsung menunjukkan adanya perbedaan hasil dimana belanja langsung memberikan dampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, alasan yang perlu dikemukakan mengapa belanja langsung memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan alokasi belanja langsung pada umumnya diperuntukkan bagi pembangunan sarana/prasarana dan infrastruktur. Pada prinsipnya alokasi belanja tersebut adalah bermuara pada optimalnya fungsi-fungsi keuangan diberbagai sektor yang meliputi pertanian,

pertambangan dan penggalan, industri dan pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa lainnya. Sektor-sektor tersebut merupakan indikator yang menggambarkan kondisi perekonomian suatu daerah, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh I Gede Dwi Purnama Putra 2012 “Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung 2001-2010” Berdasarkan uji t-statistik (uji parsial) didapati bahwa variabel belanja langsung memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi/PDRB Kabupaten Badung pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara untuk belanja tidak langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan alasan dimana belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program, seperti belanja pegawai berupa gaji, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga meskipun pada prinsipnya alokasi belanja tidak langsung bertujuan untuk menunjang dan menopang aktivitas penyelenggaraan pemerintah untuk menjalankan fungsi dan kewajibannya, hasil penelitian ini pula sejalan dengan hasil yang diperoleh dari I Gede Dwi Purnama Putra 2012, menjelaskan bahwa belanja tidak langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki kaitan erat dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah. Menurut Hasan (dalam Juwari dkk, 2016) Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat diwujudkan dengan cara meningkatkan penerimaan yang sumber dananya berasal dari dalam negeri, salah satunya adalah penerimaan pajak dan retribusi yang termasuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen penting dalam pendapatan asli daerah (PAD), yang diharapkan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Retribusi daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bukan pajak, retribusi daerah adalah pungutan daerah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Apabila penerimaan retribusi meningkat maka akan meningkatkan output berupa barang dan jasa yang dihasilkan (PDRB) karena retribusi daerah ini digunakan sebagai modal untuk menghasilkan besaran output berupa barang maupun jasa.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Belanja langsung memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Belanja tidak langsung tidak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

3. Belanja langsung dan belanja tidak langsung secara bersama memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.
4. Pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh terhadap PAD di Provinsi Sulawesi Utara.
5. Belanja langsung, belanja tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi secara bersama mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD di Provinsi Sulawesi Utara

### Saran

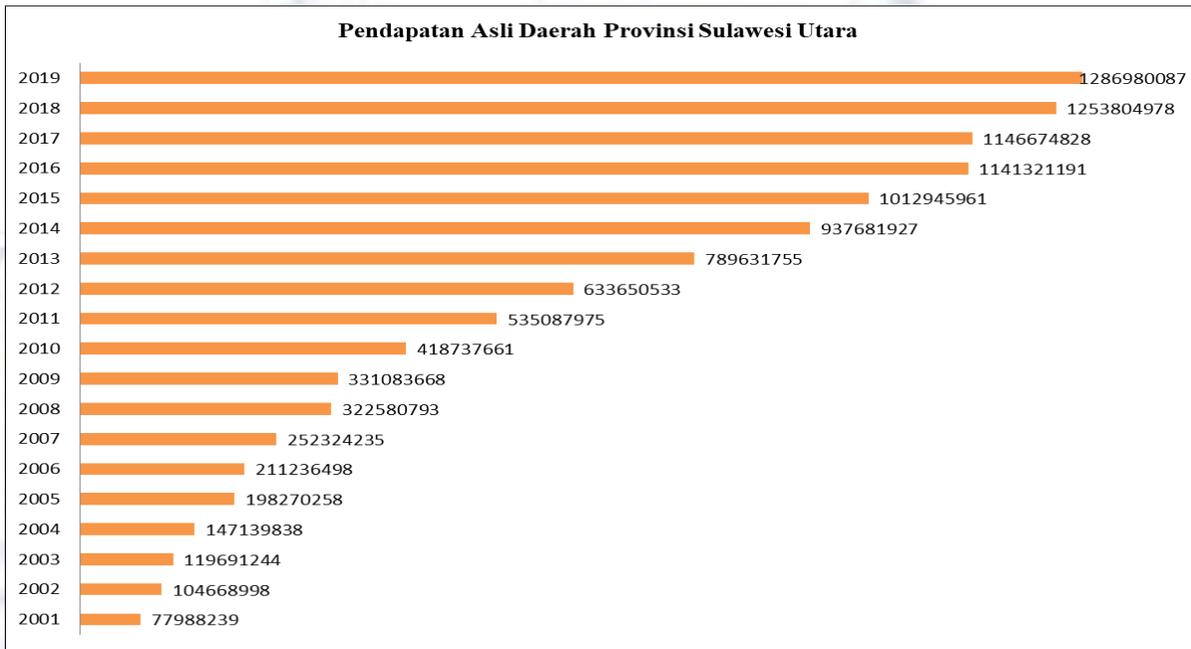
1. Dengan hasil penelitian ini, maka harapan untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kedepan adalah memberikan kebijakan terhadap tingkat kebijakan pengelolaan keuangan baik belanja langsung maupun tidak langsung.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam proses peningkatan Pertumbuhan ekonomi dan PAD di Sulawesi Utara.
3. Kepada Peneliti selanjutnya kiranya dapat menjadi bahan pembelajaran dalam melakukan penelitian selanjutnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widarjono. (2013). Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya, Ekonosia, Jakarta
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. Teori-teori Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arsyad, Lincoln. 2004. Ekonomi Pembangunan: Edisi keempat. Yogyakarta STIE YKPN
- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat
- Rudi, Mariska Ishak dkk. 2016. “ Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2009.3 – 2014.4 “. Jurnal berkala Ilmiah Efisiensi.No. 02 Vol.16.
- Sukirno, Sadono, 2000. Makro Ekonomika Modern, PT. Rasa Grafindo Persada : Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2005. Mikro Ekonomi, Teori Pengantar. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sadono, Sukirno. 2006. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Prenada Media Group.

LAMPIRAN

**Grafik 1**  
**Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara**  
**Tahun 2001-2019**



Sumber : Sulut dalam angka, 2002-2020